

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

Oleh :

Laraswisesa Kamemy

Pembimbing : Enni Savitri dan Al Azhar A

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : laras.wisesa@yahoo.co.id

*The Analyze of factors that Influence of Implementing Accrual Accounting in
Government of Riau Province (Emperical Study at SKPD Provinsi Riau)*

ABSTRACT

the research aims to analyze of influencing factors for implementing accrual accounting in government of Riau province. The data of this research is primer and started on July-August of 2016. Population of this research is department of SKPD Riau province. Samples of this research are one hundred twenty nine respondents with purposive sampling method. That data are analyzed by linear regression method and SPSS program version 19. The variables were examined are education level, training staff, the quality of information technology, additional supporting, experience, education background and size of SKPD. The results of this research showed education level has no effect to the implementing of accrual accounting with 0,622 significance, quality of technology has an effect to the implementing of accrual accounting with 0008 significance, training staff has an effect to the implementing of accrual accounting with 0,016 significance, additional supporting has an effect to the implementing of accrual accounting with 0,000 significance, education background has an effect to the implementing of accrual accounting with 0,001 significance., experience has an effect to the implementing of accrual accounting with 0,002 significance and size of SKPD has an effect to the implementing of accrual accounting with 0,537 significance The results of this research also showed that coefficient R square is 58,6%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independents variables could explain dependent variable well. While the remaining influenced by other variables not included in the regression models were not included in this study. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.

Keywords : Education, Training, Information, Supporting, Experience And Accrual Basic

PENDAHULUAN

Menurut Pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian

informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui

efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi (*information asymmetric*) antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder* lain atas penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Riau selaku pihak yang menerapkan akuntansi berbasis akrual juga dinilai oleh BPKP sebagai pihak pemeriksa internal dengan beberapa catatan penting yang menyatakan bahwa hanya 4 Kabupaten di Provinsi Riau yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini ini diberikan pada tahun 2015 pada Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti. BPKP juga menyampaikan dalam sosialisasi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan meminta seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk menyusun bagian akun, tetapkan kebijakan akuntansinya, tentukan model yang akan dipakai, dan melatih tenaga profesional yang ada didalam pemerintahan.

Beberapa kendala yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam LKPD dinyatakan kurang wajar yaitu kurangnya komitmen yang kuat dari

kepala daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, lemahnya organisasi pengelola keuangan daerah, dan masalah disiplin anggaran. Dalam kondisi penerapan SAP berbasis akrual, belum dapat berjalan baik, akuntansi berbasis akrual harus mulai dilaksanakan sejak pertanggungjawaban APBN/APBD tahun 2010.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Solihin (2007) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap.

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi yang baru (*full accrual*) dapat dikatakan masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh Setyaningsih (2013) terdapat beberapa masalah diantaranya mengenai tingkat pendidikan aparatur pemerintah yang masih rendah, masih terdapat kerumitan teknis penyusunan pelaporan pemahaman anggota dewan terhadap SAP yang masih rendah dan faktor-faktor penghambat SAP yaitu

pendidikan staf, pengalaman, fasilitas, sistem, komitmen pimpinan, sosialisasi serta intensif pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berbeda dengan Stamatiadis, et al. (2009) penelitian ini menggunakan instansi pemerintah vertikal (tingkat satuan kerja) di Indonesia, karena satuan kerja merupakan ujung tombak pemerintah pusat di daerah dan berkaitan langsung dengan setiap penerapan peraturan-peraturan baru dalam hal ini yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, pertama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan masih sangat kurang.

Penelitian Fadlan (2013) menyatakan keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengaruh faktor-faktor yang terkait didalamnya. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor organisasional, dan faktor situasional lainnya. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang

diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

Menurut penelitian Sulani (2009) bahwa keberhasilan penerapan PP No 71 tahun 2010 sangat di dukung oleh kompetensi SDM maupun perangkat pendukung. Kompetensi SDM yang baik membutuhkan perangkat pendukung yang baik pula, sehingga penerapan akuntansi akrual akan semakin berhasil. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi akrual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan situasional terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 2) Apakah pelatihan staf keuangan berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 3) Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 4) Apakah dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 5) Apakah pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 6) Apakah latar belakang pendidikan

pimpinan yang beorientasi bisnis berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual? 7) Apakah ukuran satuan kerja berpengaruh pada penerapan akuntansi akrual?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisa secara empiris pengaruh tingkat pendidikan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akrual, 2) Menganalisa secara empiris pelatihan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akrual, 3) Menganalisa secara empiris teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi akrual, 4) Menganalisa secara empiris dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak terhadap penerapan akuntansi akrual, 5) Menganalisa secara empiris pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual, 6) Menganalisa secara empiris latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis terhadap penerapan akuntansi akrual, 7) Menganalisa secara empiris ukuran satuan kerja terhadap penerapan akuntansi akrual.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual

Menurut Mardiasmo (2007:61), penerapan akuntansi akrual yaitu:

“Mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Perubahan akuntansi pemerintahan mendapat kesempatan dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

Tingkat Pendidikan Staf Keuangan

Tingkat Pendidikan Staf Keuangan secara bahasa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2008: 69) mengatakan pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Soekidjo Notoatmodjo (dalam Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008: 134) adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan organisasi yang bersangkutan.

Pelatihan Staf Keuangan

Baswir (2008:61) pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi, sebagai pemahaman tentang bagaimana untuk merancang, menerapkan dan menggunakan sistem ini menjadi meningkat. Sementara itu, menurut Ouda (2008:90), fakta bahwa karyawan yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnya, merupakan salah satu alasan

kegagalan reformasi akuntansi sektor publik.

Kualitas Teknologi Informasi

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) umumnya telah dipromosikan sebagai platform teknis yang tepat. Organisasi dengan sistem ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis di bidang fungsional dan mengumpulkan data operasional yang dibutuhkan untuk sumber daya dan analisis aktivitas dari berbagai sumber dalam satu data base pusat. Hal ini dapat merampingkan proses, mengurangi waktu proses, dan meningkatkan kontrol dalam organisasi. Studi lapangan dan survei dari laporan sektor publik menunjukkan hasil yang sama.

Teknologi informasi juga meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Dukungan Tambahan Tenaga Akuntansi / Tenaga Kontrak

Ketenaga kerjaan yang diatur tentang ketenaga kerjaan karyawan kontrak adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dengan berdasarkan pada

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan tentang PKWT ini kemudian diatur lebih teknis dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 Kontrak kerja untuk karyawan yang dimaksudkan untuk diberlakukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang selesai atau sementara sifatnya
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
3. Pekerjaan yang bersifat musiman
4. Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan

Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju Akruwal

Untuk Penerapan sistem akuntansi akrual mesti diterapkan secara bertahap, terdapat penjelasan didalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual harus segera diterapkan oleh setiap entitas. Namun, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual dapat menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual hingga batas waktu penerapan basis akrual secara penuh, yaitu tahun 2015. Dengan adanya pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai tingkat pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam menerapkan dan implementasikan

sistem yang baru tersebut. Menurut Muttaqim (2008:77), organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.

Latar Belakang Pendidikan Pimpinan

Hasil penelitian sebelumnya tentang reformasi organisasi menunjukkan bahwa pimpinan dengan latar belakang administrasi yang dominan mungkin lebih cenderung untuk menganjurkan dan mendukung inovasi administrasi yang menjanjikan untuk efisiensi dan efektivitas manajerial lebih lanjut. Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemimpin sebagai pengontrol juga bertindak sebagai pembangun motivasi bawahan serta penyusun sistem kerja dan pengembangan kualitas organisasi dan orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Ukuran Satuan Kerja

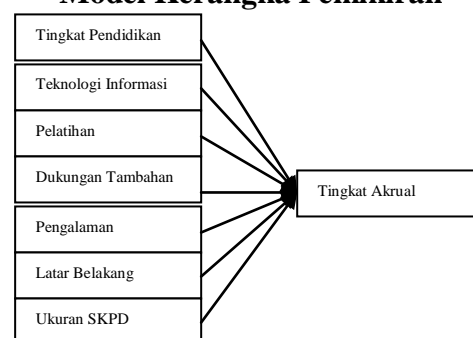
Variabel ukuran dari organisasi publik juga telah dimasukkan dalam penelitian lain akuntansi pemerintah sebelumnya sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat adopsi manajemen. Namun, pengaruh dari variabel ukuran pada tingkat penerapan tidak jelas.

Secara khusus, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mencatat adanya hubungan positif antara ukuran organisasi dan tingkat adopsi instrumen manajemen. Namun, ada penelitian yang tidak menemukan hubungan yang signifikan (Stamatiadis, et al, 2009) Kinerja organisasi publik adalah

hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Hipotesis

Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber: *Data Olahan, 2016.*

- H1 : Diduga Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- H2 : Diduga Pelatihan staf keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- H3 : Diduga Kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- H4 : Diduga Dukungan tambahan tenaga akuntansi / tenaga kontrak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- H5 : Diduga Pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- H6 : Diduga Latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.

H7 : Diduga Ukuran satuan kerja berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wilayah pemerintah provinsi Riau dan akan dilakukan penyebaran kuesioner penelitian selama 2-3 minggu pada bulan September 2016.

Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan kerja-satuan kerja dalam wilayah kerja Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari 46 SKPD dan sebagai responden adalah kasubag keuangan masing-masing SKPD, kabag akuntansi dan bendahara akuntansi. Kriteria pemilihan kasubag keuangan dan kabag akuntansi dan bendahara akuntansi sebagai responden karena diharapkan mereka mengetahui dan memahami mengenai penerapan sistem akuntansi akrual yang baru didalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan. Jenis data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan kerja dalam wilayah kerja Pemerintah Provinsi Riau sedangkan responden berasal dari kasubag keuangan dari masing-masing satuan kerja pemerintah provinsi Riau.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat penerapan akuntansi akrual
- X1 = Tingkat pendidikan staf keuangan
- X2 = Pelatihan staf keuangan
- X3 = Kualitas teknologi informasi pada satuan kerja
- X4 = Dukungan konsultan
- X5 = Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual
- X6 = Latar belakang pendidikan pimpinan
- X7 = Ukuran satuan kerja
- α = Konstanta
- βX = koefisien regresi
- e = kesalahan residual

Definisi Operasional Variabel

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan staf keuangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah rata-rata tingkat pendidikan staf atau pegawai mulai dari jenjang menengah atas (SMA) hingga pasca sarjana (S2). Pengukuran tingkat pendidikan staf keuangan dengan indikator, latar belakang staf pendidikan, strata dan periode pendidikan.

b. Kualitas teknologi informasi

Kualitas teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi akrual.

c. Pelatihan staf

Pelatihan staf keuangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tersedianya pelatihan memadai yang diselenggarakan, baik oleh satuan kerja yang bersangkutan, instansi vertikalnya, ataupun instansi lain yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi akrual pada pemerintah dan pelatihan tersebut diikuti oleh staf keuangan dari satuan kerja yang bersangkutan.

d. Dukungan tambahan

Dukungan tambahan dalam penelitian ini yaitu tenaga tambahan yang terdiri dari profesional tenaga akuntansi (TA) yang mempunyai fungsi untuk membantu staf satuan kerja dalam mendampingi staf keuangan dalam menyelesaikan tugas harian. yang mana dukungan tenaga konsultan (TA) tersebut direkrut oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Saat ini, dukungan tambahan ini telah diidentifikasi sebagai penolong utama dalam proses reformasi praktik manajemen disektor publik dan memfasilitasi proses pelaksanaan sebagai pendamping dan dukungan teknis pelaksanaan, penerapan, pengajaran juga sebagai

e. Pengalaman

Satuan kerja dengan menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai *level* pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru.

f. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan pimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang

berorientasi bisnis, yaitu lulusan di bidang ekonomi, akuntansi atau manajemen.

g. Ukuran SKPD

Penelitian ini mengasumsikan bahwa satuan kerja yang lebih besar, dalam hal jumlah pegawai, lebih mungkin telah menerapkan sistem akuntansi akrual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Penerapan akuntansi akrual yang diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, tingkat pendidikan yang diukur dengan menggunakan 3 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Teknologi informasi yang diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Pelatihan yang diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Dukungan tambahan yang diukur dengan menggunakan 4 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Pengalaman yang diukur dengan menggunakan 3 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Latar belakang yang diukur dengan menggunakan 4 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Ukuran SKPD yang diukur dengan menggunakan 3 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas 115 instrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk

mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 1
Hasil Uji Realibilitas

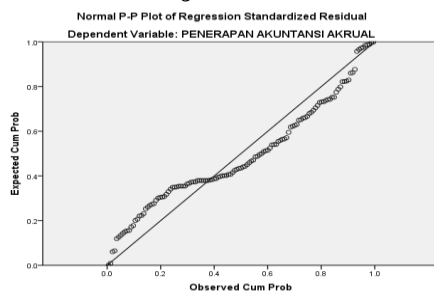
No	Variabel	Nilai Validitas
1	Y	0.000
2	X1	0.000
3	X2	0.000
4	X3	0.000
5	X4	0.000
6	X5	0.000
7	X6	0.000
8	X7	0.000

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Pengujian normalitas juga dipastikan melalui tabel Komolgrov Smirnov untuk membuktikan bahwa data distribusi normal terhadap penyebaran kuesioner.

Tabel 2
Tabel Komolgrov Smirnov

Model		Unstandardized Residual
N		129
Normal	Mean	.0000000

Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.63373592
Most	Absolute	.110
Extreme	Positive	.101
Differences	Negative	-.110
Kolmogorov-Smimov Z		1.248
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089

Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Multikolinieritas

untuk mengetahui nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	.759	1.317
X2	.626	1.599
X3	.662	1.510
X4	.584	1.711
X5	.618	1.617
X6	.757	1.321
X7	.934	1.070

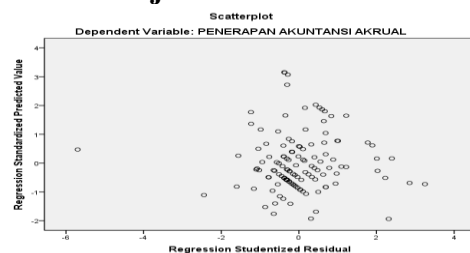
Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil uji dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka pada hasil uji multikolonieritas diasumsikan terbebas dari multikolonieritas atau terbebas dari kesalahan pengganggu.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Pada gambar diatas juga menunjukkan bahwa penyebaran titik tidak menggambarkan sebuah pola tertentu dan tersebar dengan merata dibawah dan diatas nol. Dengan kata lain, model regresi ini tidak terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Uji Autokorelasi

Pengujian auto korelasi dapat dilihat pada tabel Durbin Waston seperti dibawah ini.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Nilai dW	Nilai dL	Nilai dU	4-dU	Kesimpulan
2.163	1.4588	1.7508	2.2492	Tidak Mengandung Autokorelasi

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan tabel Durbin Waston diatas diketahui bahwa nilai Durbin Waston hitung sebesar 2,163. Apabila dibandingkan dengan nilai Durbin-Waston tabel pada tingkat signifikan 5%, dengan k=7 dan n=129 maka diperoleh dl = 1.4588 dan du = 1,7508, maka nilai 4-du = 2.5412 dan nilai 4-dl = 2.2492. Hasil dari Durbin-Waston hitung sebesar 2,163 dan nilai ini berada diposisi antara du dengan 4-dl, yaitu antara 1.7508 dan 2,5412, yang artinya bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Analisis Regresi Dan Pengujian Hipotesis

Dari pengujian regresi linier berganda yang dilakukan, diperoleh hasil uji secara parsial pada tabel dibawah ini

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	1.375	4.378	.314	.754
	X1	.118	.239	.494	.622
	X2	.453	.168	2.704	.008

X3	.338	.139	2.440	.016
X4	1.216	.203	5.979	.000
X5	.265	.278	2.955	.002
X6	.762	.221	3.450	.001
X7	.091	.147	.620	.537

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,375 + 0,118X1 + 0,453X2 + 0,338X3 + 1,216X4 + 0,265X5 + 0,762X6 + 0.091X7 + e$$

Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan terhadap Penerapan Akuntansi Akrua

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai thitung senilai 0,494 . dengan demikian diketahui thitung 0,494 < ttabel 1,979. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui tingkat pendidikan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.

Maka dapat disimpulkan H1 ditolak yaitu tingkat pendidikan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini tidak berpengaruh karena tingkat pendidikan aparatur pemerintah di SKPD Provinsi Riau tidak memepengaruhi penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Akuntansi Akrua

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai thitung senilai 2,704. Dengan demikian diketahui thitung 2,704 > ttabel 1,979. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Maka dapat disimpulkan H2 diterima yaitu kualitas teknologi informasi

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sementara itu diperoleh Pvalue 0,008 yang berarti Pvalue $0,008 < 0,05$. berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan nilai thitung senilai 2,440. Nilai t tabel sebesar 1,979. Dengan demikian diketahui thitung $2,440 > \text{ttabel } 1,979$. Maka dapat disimpulkan H3 diterima yaitu pelatihan staf keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sementara itu, diperoleh Pvalue 0,016 yang berarti Pvalue $0,016 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa pelatihan staf keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Dukungan Tambahan Tenaga Akuntansi/Tenaga Kontrak Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukandidapat nilai thitung senilai 5,979. Dengan demikian diketahui thitung $5,979 > \text{ttabel } 1,979$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Maka dapat disimpulkan H4 diterima yaitu dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sementara itu diperoleh Pvalue 0,000 yang berarti Pvalue $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa

dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai thitung senilai 2,955. Dengan demikian diketahui thitung $2,955 > \text{ttabel } 1,979$.

Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Maka dapat disimpulkan H5 diterima yaitu pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sementara itu diperoleh Pvalue 0,002 yang berarti Pvalue $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai thitung senilai 3,450. Dengan demikian diketahui thitung $3,450 > \text{ttabel } 1,979$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui latar belakang pendidikan pimpinan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Maka dapat disimpulkan H6 diterima yaitu latar belakang pendidikan pimpinan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Sementara itu diperoleh Pvalue 0,001 yang berarti Pvalue $0,001 < 0,05$.

Berdasarkan hitungan tersebut diketahui bahwa latar belakang pendidikan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual.

Pengaruh Ukuran Satuan Kerja Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai thitung senilai 0,620. Dengan demikian diketahui thitung $0,620 < t_{tabel}$ 1,979. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui ukuran satuan kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak yaitu ukuran satuan kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.

Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya ukuran satuan kerja tidak membedakan kewajiban tiap satuan kerja untuk menerapkan akuntansi akrual yang sudah diatur oleh PP No.71 Tahun 2010. Ukuran SKPD pada suatu pemerintah daerah tidak akan menentukan terlaksana atau tidaknya penerapan akuntansi akrual, hal ini dikarenakan semua SKPD pada wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia akan menerapkan akuntansi akrual pada ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga ukuran SKPD tidak mempengaruhi penerapan akuntansi akrual.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan staf keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.

- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pelatihan staf keuangan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- 4) Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa dukungan tambahan tenaga akuntansi/tenaga kontrak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- 5) Hasil Uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaal berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini berarti bahwa pengalaman aparatur memberikan kontribusi dan akan membantu penerapan akuntansi akrual.
- 6) Hasil Uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pimpinan berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual.
- 7) Hasil Uji hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa ukuran satuan kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini berarti bahwa semua satuan kerja wajib untuk menerapkan akuntansi akrual tanpa membedakan ukuran satuan kerjanya

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Provinsi Riau, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
 - 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan good governance dan hasil audit BPK dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
 - 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.
- merintahan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Program Pascasarjana UGM, 2013.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Edisi Keempat, Andi Yogyakarta.
- Muttaqim. 2008. *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ouda, Hasan A.G. 2008. Basic Requirement Model for Successful Implementation of Accrual Accounting in The Public Sector (Ed.). *Public Fund Digest*, 4(1), 78-99.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
- Setyaningsih, T, 2013. *Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta)*. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
- Solihin, A.M. (2007). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompetensi Pedagogik*

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2008, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta
- Fadlan, Muhammad, 2013, Tesis :Kesiapan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pe

- terhadap Kinerja Mengajar Guru Bantu (Stud Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tasikmalaya*. Tesis. Pogram Pascasarjana UPI. Tidak Diterbitkan.
- Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D., 2009, "Assessing Accrual Accounting Reform In Greek Public Hospital: An Empirical Investigation". *International Journal of Economic Science and Applied Research*, 4,1, PP 153-184.
- Sulani, 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Tidak Dipublikasi. Universitas Sumatera Utara.
- Tjutju Yuniarsih dan Suwatno (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesatu, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara